



Judul : Pariwisata Bali masih sepi: pelaku UMKM butuh insentif
Tanggal : Senin, 25 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pariwisata Bali Masih Sepi Pelaku UMKM Butuh Insentif

ANGGOTA Komisi VI DPR I Nyoman Parta prihatin dengan situasi pariwisata di Bali yang tak kunjung membaik. Dikawatirkan, kondisi ini membuat banyak pelaku wisata di Bali bangkrut.

Nyoman merujuk data kunjungan wisatawan ke Bali pada Tahun 2022 ini yang tak menunjukkan peningkatan signifikan. Di Januari, jumlah wisatawan ke Bali tercatat 144.744 jiwa. Sementara di Februari turun signifikan hingga 18.455 jiwa.

Angka wisatawan ini sangat kontras di periode yang sama sebelum pandemi. Di mana pada Januari-Februasi 2019, tercatat wisatawan yang masuk ke Bali rata-rata mencapai 1, 2 juta orang.

“Jadi kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini masih sangat jauh dari jumlah idealnya,” kata Nyoman, kemarin.

Untuk itu, dia meminta pemerintah gerak cepat membantu pelaku usaha di Bali, jangan sampai terlambat. Sebab di tahun 2023 ini akan banyak pengusaha pariwisata dan pelaku UMKM yang memiliki kredit di perbankan berpotensi macet.

Nyoman bilang, banyak pelaku usaha pariwisata dan UMKM serta pemilik Kredit Pemilikan Rumah (KPR) cemas pada situasi perekonomian Bali yang tak kunjung membaik. Kendati sudah banyak kebijakan memudahkan wisatawan lokal dan asing masuk, nyatanya perekonomian di Bali masih lesu. Kini, harapan besar mereka ada di pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan relaksasi bagi para debitur perbankan.

Sementara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021 tentang perpanjangan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan

yang terdampak Covid-19 berakhir sampai 31 Maret 2023. Jika relaksasi dan restrukturisasi ini berakhir, pembayaran kredit pokok dan bunga akan terakumulasi dengan pembayaran normal.

“Tentu hal ini akan sangat menyulitkan. Di satu sisi beban lebih besar, sedangkan kemampuan membayar makin tidak ada. Sedangkan penambahan modal tidak dimungkinkan karena terbentur dengan berbagai peraturan,” katanya

Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui Bank Himbara membantu para pelaku usaha di Bali melalui berbagai program penyelamatan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan langkah Afirmatif, perpanjangan masa relaksasi dan restrukturisasi kredit.

“Berikan seringan-ringannya dan bahkan langkah pemutihan, terutama untuk UMKM,” harapnya. ■ KAL